**Review Artikel**

**The Implications of Digital Ccollection Takedown Requests on Archival Appraisal**



**Nama : Geizka Charissa Ilma**

**NIM : 071911633022**

**Mata Kuliah : Etika Pelayanan**

**PROGRAM STUDI ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN**

**DEPARTEMEN ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2020**

IDENTITAS JURNAL

Judul Jurnal : Archival Science

Judul Artikel : The Implications of Digital Collection Takedown Requests on Archival

Appraisal

Halaman : 91 - 101

Tahun : 2019

DOI : 10.1007/s10502-019-09322-y

*Authors* : Shelly Black ( University of Arizona, Tucson, USA )

REVIEW JURNAL

* 1. Latar Belakang Masalah

Pemrosesan minimal dan digitalisasi skala massal memungkinkan arsiparis membuat materi dapat diakses secara online dengan cepat dan efisien. Dorongan untuk membuat koleksi digital berpijak pada nilai-nilai profesi terkait akses dan *open access* serta gerakan *Creative Commons* di kalangan akademisi dan masyarakat luas. Materi yang tersebar luas dapat mengandung materi pribadi atau budaya sensitif sehingga diterapkannya undang-undang privasi data yang baru dan pertimbangan terkait apa yang diperlukan untuk pengarsipan dan penilaian.

Pada Mei 2018, Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) diterapkan di Uni Eropa (UE). GDPR menawarkan perlindungan data dan privasi kepada warga negara Uni Eropa dan berlaku untuk informasi mereka secara global. Kemudian, hak untuk dilupakan (RTBF), yang juga dikenal sebagai hak untuk menghapus, sebuah konsep di mana seseorang memiliki otonomi atas informasi online mereka dan tidak boleh dihukum berdasarkan itu.

Kode etik profesional mewajibkan arsiparis untuk melindungi privasi, namun informasi sensitif dapat dirilis dalam koleksi digital tanpa disadari. Kearsipan dan perpustakaan telah menerima permintaan penghapusan koleksi digital karena adanya informasi pribadi dan memberatkan, materi yang peka budaya, dan pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, Arsiparis harus berhati-hati dengan tanggung jawab mereka kepada individu yang privasinya dapat dikompromikan.

Namun, di tengah pembuatan GDPR, arsiparis, pustakawan, dan sejarawan sangat menentang undang-undang RTBF dan mengkritik dampaknya terhadap integritas dan keaslian catatan sejarah dalam jangka panjang. Sementara itu, arsiparis hendaknya tidak hanya mempertimbangkan kemungkinan menerima permintaan penghapusan yang meningkat dan apa kewajiban hukum mereka, tetapi juga implikasinya bagi penilaian arsip. Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi bagaimana permintaan penghapusan koleksi digital, selain pendukung dan kritik mereka, juga diposisikan sehubungan dengan teori penilaian.

**1.2 Fokus masalah yang diteliti**

Fokus masalah yang diteliti adalah terkait bagaimana permintaan penghapusan koleksi digital, selain pendukung dan kritik mereka, yang diposisikan sehubungan dengan teori penilaian. Hal tersebut juga diikuti dengan diskusi tentang bagaimana permintaan penghapusan mempengaruhi praksis penilaian dan bagaimana arsiparis dapat lebih siap untuk menguranginya.

* 1. **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk membahas permintaan penghapusan koleksi digital, selain pendukung dan kritik mereka, yang diposisikan sehubungan dengan teori penilaian dan permintaan penghapusan yang mempengaruhi praksis penilaian dan bagaimana arsiparis dapat lebih siap untuk menguranginya.

.

**1.4 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal ini adalah kualitatif. Artikel ini menggunakan berbagai studi pustaka yang mengacu pada literatur kearsipan mengenai redaksi informasi pribadi dari koleksi fisik dan digital serta perspektif tentang *Right To Be Forgotten* (RTBF) dan perpustakaan dari sejarahwan dan sarjana hukum.

* 1. **Teori**

Meskipun GDPR mulai berlaku pada tahun 2018, putusan Uni Eropa 2014 menyatakan bahwa hak privasi individu melebihi kebutuhan publik akan informasi, bergantung pada apakah mereka tokoh publik, dan bahwa mesin telusur harus menghapus tautan ke situs yang berisi informasi tentang pihak ketiga, meskipun sah, ketika subjek data menganggapnya tidak relevan atau tidak memadai (Vavra 2018).

Disisi lain, pada Pasal 17 (3) GDPR menyatakan bahwa ada situasi di mana RTBF tidak berlaku, arahan tersebut mungkin memiliki interpretasi yang berbeda di pengadilan di masa mendatang dengan pengecualian-pengecualian tertentu. Sedangkan, kode etik profesi menghimbau arsiparis untuk melindungi privasi (International Council on Archives 1996 ; Society of American Archivists 2011). Arsiparis termasuk juga pustakawan terbiasa menyeimbangkan akses dengan privasi, akan tetapi banyak yang mengklaim bahwa RTBF bertentangan dengan nilai-nilai profesi.

Adapun kritik mengenai perbedaan model permintaaan penghapusan yaitu Vavra (2018) membahas bagaimana keputusan penghapusan menjadi bermasalah karena diserahkan kepada perusahaan, seperti Google, yang tidak terlalu transparan dikarenakan adanya ketidaksetaraan akses di setiap negara yang tentu memiliki hasil berbeda-beda dalam mesin pencari tersebut. Selain itu, mereka yang berada di sisi kesenjangan digital lebih cenderung membuat permintaan penghapusan. Oleh karena itu, individu dengan hak istimewa atau kekuasaan dapat lebih mudah menuai manfaat dari RTBF. Hal tersebut sejalan dengan adanya perpustakaan dan arsip yang memang telah menerima permintaan penghapusan dari mereka yang memegang kekuasaan di Amerika Serikat.

Selain mempengaruhi penyimpanan digital catatan, Beckles ( 2013 ) mengakui bahwa RTBF juga berdampak pada penilaian, seleksi, dan pelestarian. Dalam hal ini, Beckles menjelaskan bahwa arsiparis memilihara konten, struktur, dan konteks catatan dan kemampuan arsiparis untuk memilih informasi tersebut berdasarkan ketrampilan yang diperoleh dari penilaian arsip akan terganggtu, apabila informasi tersebut, dengan alasan apapun, telah dihapus.

**1.6 Hasil dan Pembahasan**

**1.6.1 Teori penilaian dan *Right To Be Forgotten* (RTBF)**

Teori penilaian memiliki konsekuensi yaitu pendekatan yang digerakkan oleh pencipta untuk menentukan apa yang termasuk dalam arsip. Pendekatan yang digerakkan oleh Hilary Jenkinson pada tahun 1930-an mempercayai bahwa integritas dan keaslian arsip bergantung pada sejarah adat mereka dan keadaan di mana arsip itu dibuat, dan jika arsiparis berusaha untuk menentukan apa yang bernilai, ketidakberpihakan arsip akan hancur (Tschan 2002). Hal tersebut mengakibatkan pencipta menjadi satu-satunya yang bisa menilai rekaman mana yang dihancurkan, sedangkan hingga pertengahan abad kedua puluh, arsiparis tidak dilibatkan dalam memberikan nilai pada catatan dan membuat keputusan penilaian (Cook 2011 ).

Disisi lain, Cook (2011) menunjukkan bahwa pencipta dapat menghancurkan informasi jika mereka terlalu melindungi privasi mereka, ingin menghindari skandal atau rasa malu, atau menyembunyikan masa lalu untuk mempengaruhi masa depan. Hal tersebut mengakibatkan akuntabilitas tokoh masyarakat menjadi rusak dikarenakan permintaan penghapusan dapat dibuat oleh individu yang memiliki posisi berkuasa, memiliki sumber daya lebih besar dan kapasitas untuk berperkara. Sedangkan, mereka yang terpinggirkan memiliki risiko lebih besar karena informasi pribadi mereka ditampilkan secara online untuk umum.

Arsiparis yang berkomitmen untuk menghormati dan melestarikan suara yang dicabut haknya dan kurang terwakili dapat mendasarkan praktik mereka dalam penilaian partisipatif. Shilton dan Srinivasan (2007) mengusulkan bahwa menggunakan pendekatan penilaian untuk permintaan pengapusan yaitu dengan bekerja sama antara arsiparis dan komunitas atau individu yang sama – sama memiliki kesempatan dalam menilai nilai arsip. Sedangkan, studi perpustakaan akademis Schofield dan Urban juga mengungkapkan hal yang sama yaitu dengan memungkinkan diskusi dan kesepakatan yang membahas masalah dan mencegah perselisihan lebih lanjut (Schofield dan Urban 2016, hal. 143).

Teori penilaian yang dikemukakan oleh Schellenberg percaya bahwa seleksi diperlukan ketika memperoleh catatan, terutama karena volume mereka di pemerintahan meningkat (Tschan 2002 ). Ia juga percaya bahwa catatan tidak hanya memiliki nilai primer, yang merepresentasikan kegunaannya bagi penciptanya, tetapi juga nilai sekunder, yang berkaitan dengan kepentingannya bagi peneliti. Namun, para arsiparis tidak setuju dengan nilai-nilai yang didorong oleh penelitian Schellenberg. Sedangkan, menurut Henttonen, RTBF, atau manajemen privasi mandiri, memisahkan arsiparis dari misi mereka. Dalam hal ini, praktisi termasuk juga arsiparis harus menyadari bagaimana teori mendukung pengambilan keputusan untuk menetapkan arah yang sesuai untuk standar penilaian di dunia hukum perlindungan data dan permintaan penghapusan.

* + 1. **Praksis penilaian**

Arsiparis yang merupakan bagian dari suatu lembaga diharapkan lebih siap untuk permintaan penghapusan dengan mengakui implikasinya sejak awal dalam mengelola catatan selama penilaian. Dalam hal ini, arsiparis perlu mengambil langkah-langkah yang bijak dalam melakukan penilaian. Langkah yang dapat diambil yaitu dengan menggunakan *Privacy by Design* yang menanamkan prinsip privasi pengguna ke dalam pembuatan sistem TI dan praktik bisnis (Cavoukian 2011 ). Akan tetapi, juga membutuhkan tindakan yang melindungi privasi pengguna. Kemudian, kebijakan yang dapat dilakukan adalah membantu memastikan adanya konsistensi dalam pengambilan keputusan untuk menyunting atau menyimpan informasi. Hal tersebut nantinya akan membantu arsiparis menghindari pengawasan publik yang tidak menguntungkan. Selain itu, arsiparis juga dapat menerapkan pendekatan yang berpusat pada pengguna untuk penilaian saat menulis kebijakan dan perjanjian, serta merencanakan akses koleksi.

Dalam mengurangi permintaan penghapusan yang memengaruhi praksis penilaian terdapat berbagai usulan yang dapat dilakukan oleh Arsiparis yaitu pertama, OCLC (2010) menyarankan agar arsiparis bekerja sama dengan donor terlebih dahulu, yang mana memerlukan penanganan masalah privasi dan kekayaan intelektual. Kedua, Gilliland dan Wiener (2014) menyarankan arsiparis untuk mempertimbangkan tidak hanya tanggung jawab mereka kepada donor, tetapi juga kebijakan institusi mereka tentang pembatasan akses atau penyediaan sesuatu dan pada tingkat apa. Dalam hal ini, arsiparis dapat mempertimbangkan potensi masalah akses online dari materi yang didigitalkan serta mendidik donor mengenai potensi pelanggaran privasi pihak ketiga. Selain itu, arsiparis juga perlu mempertimbangkan manfaat dan konsekuensi dengan adanya berbagai mode akses. Misalnya, Moravec (2017) menyarankan agar arsiparis menggunakan platform digital yang dikontrol peserta seperti Mukurtu, yang dibangun dengan berbagai jenis izin untuk masyarakat asli.

Tidak hanya itu, terdapat juga usulan untuk arsiparis terkait bagaimana menjaga privasi dalam koleksi digital. Usulan agar arsiparis lebih memperhatikan materi sensitif selama penilaian dengan melakukan audit privasi awal (Gilliland dan Wiener ( 2014 ). Hal tersebut nantinya membantu arsiparis menentukan jumlah informasi yang mungkin memerlukan redaksi, jenis pembatasan akses apa yang diberlakukan, dan kesesuaian koleksi untuk digitalisasi internet. Usulan lainnya menyarankan agar arsiparis melakukan pemrosesan tingkat item yang beragam untuk mengukur keberadaan informasi pribadi dalam koleksi. Akan tetapi, usulan – usulan diatas belum didukung oleh sumber daya staf dikarenakan sumber daya staf yang terbatas (Gilliland dan Wiener 2014 ). Oleh karena itu, terdapat alternatif yang dapat dilakukan yaitu dengan mendigitalkan sampel rekaman yang sesuai untuk rekaman yang digunakan untuk generalisasi (Farley dan Willey 2015 ).

Terakhir arsiparis juga dapat mempertimbangkan untuk menambah perjanjian pengguna atau formulir kerahasiaan bagi peneliti. Arsiparis juga sebaiknya memasukkan prinsip privasi ke dalam penilaian. Hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan bahwa organisasi melakukan upaya dengan niat baik untuk menegakkan nilai-nilai etika.

* 1. **Kesimpulan**

Adanya dampak dari hukum data pribadi dan permintaan penghapusan koleksi digital terhadap arsip, termasuk praktik penilaian diperlukan pengadopsian teori yang menjadi landasan untuk mengambil keputusan penghapusan koleksi digital. Dalam hal ini, arsiparis juga berperan untuk keputusan terkait permintaan penghapusan yang memerlukan pertimbangan saat membuat pembatasasn data pribadi. Hal tersebut tentunya juga ditunjang dengan adanya saran-saran yang telah disajikan. Disamping itu, peraturan federal informasi pribadi dan format inovatif disinformasi juga akan mengharuskan arsiparis untuk memikirkan kembali proses penilaian mereka. Hal tersebut dikarenakan penyebaran berita palsu dan informasi palsu tentang seseorang dapat mengancam privasi dan merusak reputasinya.

* 1. **Kelebihan dan Kekurangan**

1. Kelebihan

* Penulis menguraikan penjelasan berdasarkan studi pustaka yang banyak melibatkan para ahli dibidangnya.
* Adanya contoh-contoh yang menyertai untuk memudahkan pembaca memahami maksud dari suatu penjelasan.
* Adanya penjelasan mengenai studi untuk masa depan

1. Kekurangan

* Penulis banyak menguraikan penjelasan berdasarkan para ahli, akan tetapi penulis juga perlu memberikan tambahan penjelasan mengenai yang diuraikan para ahli.
* Terdapat istilah-istilah yang juga memerlukan penjelasan lebih lanjut